

ANALISIS TINJAUAN ATAU GAMBARAN EKONOMI MAKRO TERHADAP EKONOMI REGIONAL DAN NASIONAL

MOHAMMAD NASIKH

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang

Email: m.nasikh@gmail.com

ABSTRACT

The economic structure, when viewed from the perspective of expenditure, will always be closely linked to Household and Corporate Consumption (C), Government Expenditure (G), Investment (I), and Exports-Imports (X – M). Consumption is divided into Household and Corporate/Industrial Consumption (C), which also includes consumption expenditures by non-profit institutions, as well as Government Consumption (Government Expenditure = G). These types of consumption are the most determining factors or play the most significant role in the economic conditions of a region (regional) and a country (national), typically accounting for about 70 percent of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) or Gross National Product (GNP) annually. Productive Investment (I) made by a region or country within the context of GRDP or GNP serves as a foundation for future steady income and acts as a multiplier effect factor, significantly influencing the increase in regional or national income. Productive investments are expected to contribute around 15 percent of GRDP. Similarly, Exports (X) should far exceed Imports (M) because when X significantly surpasses M, it can generate substantial foreign exchange or a surplus in the Balance of Payments (BoP). Conversely, if a region or country imports more than it exports, it will experience trade deficits, financial losses, a Passive Trade Balance, or a Negative Net Import Balance. Such a situation will greatly impact the regional or national economy, including an increase in debt, stagnation in the domestic economy and industries, and the bankruptcy of many businesses and industries. If productive investments are relatively high (around 40 percent of GRDP), this will positively boost the domestic industry, including large, medium, and small-scale manufacturing industries. Imports, which typically play a role of around 27 percent, also contribute significantly. A large population in a region or country serves as a very potential market share.

Keywords: *Macro Economy, Regional and National Economy*

PENDAHULUAN

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) meliputi seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga suatu penduduk, baik pembelanjaan untuk makanan atau non-makanan. Nilai konsumsi rumah tangga (C) seperti yang terlihat di tabel I, jika dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun maka akan terlihat rata-rata besarnya pengeluaran perkapita atau penduduk

masyarakat baik untuk makanan atau non-makanan yang meliputi pembelanjaan untuk pakaian, pendidikan, perumahan, kesehatan, barang-barang tahan lama atau barang-barang yang mudah rusak (*perishable*), rekreasi dan sebagainya. Laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ini tidak bisa lepas dari pertumbuhan penduduk (*population growth*) yang menjadi salah satu tujuan

perpindahan atau migrasi dari daerah-daerah lain, selain itu juga ditentukan oleh daya beli (*purchase power*) masyarakat, dan pola konsumsi (*consumption style*) masyarakatnya. Percepatan peningkatan daya beli masyarakat merupakan salah satu target (*goal*) untuk bisa mencapai kemakmuran atau kesejahteraan (*welfare*) dengan angka 80 pada tahun tertentu (misal 2020) dan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Target ini bisa dicapai dengan meningkatkan pendapatan regional atau nasional melalui peningkatan dan perluasan peluang usaha, penyerapan tenaga kerja (*employment*), mengurangi jumlah pengangguran (*unemployment*) dan peningkatan produktivitas (*productivity increase*) di tingkat regional dan nasional.

Tabel 1
Contoh Gambaran PDRB menurut Penggunaan di suatu Daerah atau Negara dari tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Pengeluaran KRT	123.024,20	137.281,92	154.029,82	165.744,29	185.012,47
a. Makanan	75.268,44	86.916,06	95.376,74	100.460,55	111.757,61
b. Non Makanan	47.755,76	50.365,86	58.653,072	65.283,74	73.254,86
2. Konsumsi LNP	1.174,46	1.239,90	1.397,89	1.532,10	1.664,72
3. Konsumsi Pem.	11.145,32	12.896,96	14.870,73	17.769,82	21.985,75
4. PMTB	30.581,65	33.585,70	36.073,19	40.873,46	47.749,37
5. Perubahan Stok	3.650,57	5.211,60	3.695,08	4.919,20	6.631,79
6. Ekspor	82.923,33	88.114,30	100.710,28	104.618,82	125.621,45
a. Antar Negara	54.860,16	52.632,17	63.318,90	66.863,64	83.036,58
b. Antar Propinsi	28.063,17	35.482,12	37.391,39	37.755,18	42.584,87
7. Impor	56.746,51	59.143,42	69.369,60	64.762,70	83.359,95
a. Antar Negara	16.088,12	17.858,09	16.763,35	15.114,99	15.788,33
b. Antar Propinsi	40.658,39	41.285,33	52.606,26	49.647,71	67.571,62
Jumlah	195.753,03	219.186,97	241.407,39	270.695,00	305.305,61

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Government Expenditure atau Konsumsi Pemerintah (G) rata-rata setiap tahunnya sekitar 6 persen dari PDRB dimana komponen ini meliputi seluruh konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah (G) baik di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dan alokasi pusat untuk daerah tersebut. Konsumsi tersebut merupakan penjumlahan belanja barang dan jasa (C) dengan belanja pegawai (G), penyusutan barang modal (Dep.) dikurangi pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi sendiri (Y). Otonomi daerah yang dilaksanakan penuh akan berdampak kepada nilai tambah (*added value*) dengan keterlibatan kebijakan pemerintah atau *government policy engagement* (G), hal ini dikarenakan adanya perubahan status kepegawaian

dan peraturan daerah tentang perekonomian. Walaupun begitu, penghitungan konsumsi tidak langsung bisa berubah secara signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada konsumsi pemerintah (G) lebih banyak disebabkan besarnya perubahan dari belanja barang dan jasa (delta G) karena sesuai dengan pertumbuhan APBD atau APBN.

Tabel 2
PDRB yang Diharapkan adalah konstan 2020 Tahun 2020-2024 (dalam milyar rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Pengeluaran KRT	123.024,20	125.367,30	129.647,66	133.241,04	136.362,20
a. Makanan	75.268,44	77.267,65	79.735,45	82.564,29	85.658,49
b. Non Makanan	47.755,76	48.090,65	49.912,21	50.676,75	50.703,70
2. Konsumsi LNP	1.174,46	1.138,78	1.192,74	1.284,67	1.301,88
3. Konsumsi Pem.	11.145,32	11.354,65	12.688,33	14.985,26	16.793,27
4. PMTB	30.581,65	31.801,63	32.595,28	34.272,57	35.778,03
5. Perubahan Stok	3.650,57	5.100,63	3.161,36	4.658,18	6.601,64
6. Ekspor	82.923,33	82.483,04	93.365,02	89.434,76	103.127,57
a. Antar Negara	54.860,16	48.526,31	58.961,11	59.056,98	70.821,11
b. Antar Propinsi	28.063,17	33.956,73	34.403,91	30.377,77	32.306,46
7. Impor	56.746,51	53.877,27	61.258,80	56.911,16	67.779,78
a. Antar Negara	16.088,12	15.863,99	15.374,75	13.760,98	12.697,99
b. Antar Propinsi	40.658,39	38.013,28	45.884,06	43.150,17	55.081,79
Jumlah	195.753,03	203.369,00	211.391,59	220.965,31	232.184,81

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Pembentukan Modal Tetap Bruto dari hasil Investasi (I) yang dilakukan oleh perusahaan, industri dan berbagai institusi pemerintah atau non-pemerintah seperti BUMD/BUMN dari tahun 2020 sampai 2024 diharapkan mengalami peningkatan. Institusi atau lembaga ini menyebar di sembilan sektor lapangan usaha (dari sektor pertanian sampai sektor jasa-jasa). Investasi (I) dilakukan pada berbagai jenis barang modal seperti bangunan gedung, kendaraan lalu-lintas umum, mesin-mesin produksi, peralatan, dan yang lainnya. Iklim usaha investasi (*investment business climate*) yang semakin membaik, terutama masalah keamanan lingkungan (*security environment*), berkurangnya pungutan-pungutan liar (biaya siluman) dan birokrasi yang tidak berbelit-belit (*non-complicated birocracy*) dan kemudahan-kemudahan lainnya diharapkan dapat menjadi daya-tarik para investor baru. Demikian juga bagi para investor lama, pengembangan usaha-usaha baru dengan menambah barang-barang modal memerlukan iklim yang diyakini dapat memberi kepercayaan (*trust*) untuk pengembalian semua

yang diinvestasikan secara menguntungkan (*profitable investment or yield*). Pertumbuhan investasi (*investment growth*) diharapkan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan dapat mengurangi pengangguran (*decreasing of unemployment*) meskipun penambahan mesin-mesin baru yang berteknologi tinggi di satu sisi sangat efisien untuk industri tapi di sisi yang lain juga tidak menjanjikan bisa mengurangi pengangguran (*unemployment*). Tentunya, harus dipikirkan sektor apa saja yang dibutuhkan dengan teknologi padat karya atau padat modal tanpa mengesalkan efisiensi perusahaan. Pengembangan investasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga perlu mendapatkan perhatian secara khusus karena surplus bisnis dari UMKM untuk dibawa keluar daerah lainnya yang kemungkinannya kecil sekali, sehingga setiap kenaikan investasi dapat membawa dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan (*welfare*) bagi penduduk setempat.

Dengan dipacunya ekspor (X) yang cukup besar dan dengan dipermudahnya regulasi ekspor tersebut dengan perubahan yang signifikan, maka akan mendorong pemasukan atau pendapatan daerah atau negara. Memang banyak faktor yang sangat mempengaruhi komponen ekspor ini, yang justru pemda setempat atau pemerintah pusat lebih menggalakkan impor dari pada ekspor. Kebijakan seperti ini seringkali merupakan faktor penghambat dari eksternal perusahaan bahkan bagi pemda sendiri. Kita semua mengetahui bahwa kebijakan tentang ekspor-impor ini hampir semuanya merupakan kebijakan nasional termasuk kemudahan-kemudahan ekspor-impor di kawasan berikat. Kestabilan kurs mata-uang sebagai salah satu penentu perubahan ekspor-impor saja kadangkala tidak bisa disiasati di tingkat propinsi dimana dari tahun 2020 ke 2024 kurs dolar berfluktuasi antara 14.000 sampai dengan 16.000 rupiah. Tetapi sebenarnya masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk saat ini, seperti pengawasan kualitas produk (*product quality control*), efisiensi

berusaha dengan menghindari adanya biaya ekonomi tinggi (*high economic costs*), sehingga harga produk bisa bersaing (*competitive*) di pasar dunia, adanya kreasi dan inovasi produk-produk baru sehingga dapat menciptakan brand image yang baik, dan bisa menjadi fasilitator bagi para pengusaha dengan para pembeli (*buyers*).

Jelasnya, pada pembahasan ini akan dibahas kinerja (*performance*) dari masing-masing komponen pengeluaran (*expenditures*) lebih rinci, baik menyangkut nilai nominal dan perannya terhadap struktur ekonomi, perubahannya secara riil yang bisa menunjukkan laju pertumbuhan setiap komponen ekonomi, dan pengaruhnya terhadap perekonomian daerah (*regional*) pada berbagai sektor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ada dua macam, yaitu Variabel Ekonomi Makro (X) sebagai variabel bebas (*independen*) dan Variabel Ekonomi Regional dan Nasional (Y) sebagai variabel terikat (*dependen*). Untuk membatasi pengertian dari variabel-variabel penelitian ini, akan dikemukakan definisi operasional mengenai variabel ekonomi makro, yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan perusahaan (C), pengeluaran konsumsi lembaga nir-laba (*non-profit*) seperti dari yayasan dan pendidikan, pengeluaran konsumsi pemerintah (G), pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi (I), dan ekspor dan impor (X dan M). Sedangkan untuk variabel terikat (*dependen*)-nya adalah pendapatan nasional (Y) yang terdiri dari beberapa macam pendapatan nasional, yaitu antara lain: *Gross National Product* (GNP), *Net National Product* (NNP), *National Income* (NI), *Personal Income* (PI), dan *Disposable Personal Income* (DPI).

Data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan bersifat kuantitatif. Dikatakan data sekunder karena data diambil dari sumber jurnal atau laporan yang lain juga dari pihak-pihak yang

terkait dengan proses penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah dengan menggunakan uji regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X (Ekonomi Makro) terhadap variabel Y (Ekonomi Regional dan Nasional), maka perlu dicari nilai a_1 dan a_2 sebagai parameter untuk mendapatkan persamaan $Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2$ persamaan tersebut diturunkan menjadi persamaan $E \frac{dx}{dy}$ dalam mengembangkan besarnya variabel X terhadap variabel Y.

PEMBAHASAN

Pengeluaran Konsumsi RumahTangga (C)

Nilai konsumsi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu mengalami kenaikan sesuai dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan harga dari barang dan jasa, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Nilai komponen ini bergerak dari 123 024 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 185 012 milyar rupiah pada tahun 2024. Kenaikan itu mencapai 11,59 persen pada tahun 2021 selanjutnya 12,20 persen, 7,61 persen dan pada tahun 2024 tumbuh mencapai 11,63 persen. Tetapi jika melihat besarnya inflasi yang terjadi pada pengeluaran ini yang dari 2021 mencapai 9,50 persen, 8,50 persen, 4,70 persen dan 9,08 persen, maka akan kita lihat bahwa kenaikan riil dari konsumsi rumah tangga ini hanya 1,90 persen di tahun 2021 kemudian meningkat 3,41 persen, 2,77 persen dan 2,34 persen.

Tabel 3
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Inflasi dan PDRB Perkapita

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga		1,90	3,41	2,77	2,34
Inflasi KRT		9,50	8,50	4,70	9,08
Distribusi KRT	62,85	62,63	63,80	61,23	60,60
PDRB Perkapita (milyar Rp)	5.479,685	6.017,73	6.494,10	7.134,25	7.880,89

Sumber : Data Diolah (2024)

Kenaikan riil ini merupakan perubahan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan dan menunjukkan Konsumsi Rumah Tangga yang

sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh besarnya inflasi. Kenaikan tersebut merupakan perubahan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini juga ditandai juga dengan PDRB perkapita yang setiap tahunnya meningkat sekitar 9,5 persen walaupun ini merupakan angka rata-rata dan tidak semua PDRB perkapita ini dinikmati oleh masyarakat.

Peranan Konsumsi Rumah tangga sejak tahun 2020 sampai tahun terakhir 2024 mengambil porsi diatas 60 persen, sehingga mempunyai multiplier effect yang tinggi sehingga perubahan yang kecilpun akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah (*regional*). Jika melihat komposisi pengeluaran konsumsi untuk makanan dan non-makanan, maka rata-rata dalam lima tahun terakhir sekitar 60 persen untuk pengeluaran makanan dan hampir 40 persen untuk non-makanan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 komponen ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi jika dibandingkan atas dasar harga konstan 2023, ada sebagian porsi dari Konsumsi Rumah Tangga yang terambil terutama oleh investasi dan net ekspor.

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nir-Laba (*Non Profit*)

Pengertian lembaga Nir-Laba (*Non Profit*) secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang bebas atau independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. Secara khusus Bank Dunia mendefinisikan *Non Government Organization* (NGO) atau kemudian juga diterjemahkan sebagai organisasi swasta (*non-government*) yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang ter-marginalkan atau terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*).

Maraknya Lembaga Nir-Laba atau Non Profit di Indonesia dimulai sejak tahun 2000 sejak adanya Peraturan Pemerintah (Permen) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang cara pelaksanaan

peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Tetapi, untuk lembaga non-profit yang bersifat keagamaan sudah lama ada dan cukup banyak.

Keterlibatan dari Lembaga-lembaga Non-Profit rielya sangat kecil atau kurang dari 1 persen dari nilai PDRB. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 komponen ini hanya sekitar 0,55 sampai dengan 0,60 persen. Laju pertumbuhan untuk Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit adalah -3,04 pada tahun 2021 karena booming komponen ini terjadi di tahun 2020, meningkat lagi 4,74 persen pada tahun 2022 dan selanjutnya 7,71 persen pada tahun 2023 dan 1,34 persen pada tahun 2024. Lembaga ini selain mendapatkan dukungan dari pemerintah juga mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga donor internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh lembaga ini namun perkembangannya belum mampu mendongkrak perkembangan ekonomi secara menyeluruh (*agregat*) jika dibandingkan dengan komponen-komponen penyusun PDRB yang lain.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G)

Dalam menjalankan kegiatan rutin, pemerintah memang membutuhkan anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin pegawai dan keperluan pembiayaan pembangunan. Besar kecilnya pengeluaran Konsumsi Pemerintah atau *Government Expenditure* (G) sangat dipengaruhi oleh komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa. belanja modal dan belanja pemerintah lainnya. Fungsi atau peran yang dimiliki oleh pemerintah ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Jumlah pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu komponen penting dari PDRB.

Secara teoritis kenaikan pengeluaran pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024

merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan lewat instrumen kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Instrumen ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan perekonomian.

Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pengeluaran pemerintah secara nominal selalu semakin membesar dari tahun ke tahun sesuai dengan peningkatan pada APBD dan APBN. Kontribusi Konsumsi Pemerintah (G) pada periode tersebut berkisar antara 6 sampai dengan 7 persen, tahun 2024 mencapai angka 7,23 persen karena pengeluaran pemerintah (G) pada tahun ini melonjak dengan adanya pemilu. Rata-rata setiap tahun, pengeluaran belanja barang menghabiskan sekitar 32 - 35 persen dari konsumsi pemerintahan (G) dan belanja pegawainya punya porsi berkisar antara 58 sampai 65 persen, sedangkan penyusutan barang modal antara 3 – 5 persen dan tahun 2024 porsi belanja barang mencapai 35,4 persen. Kecuali untuk tahun 2020 belanja barangnya mencapai 44 persen, belanja pegawai 52 persen, polanya mengalami pergeseran setelah Otonomi Daerah diterapkan secara utuh, dan pegawai pusat banyak yang dilimpahkan menjadi pegawai pemerintah daerah. Secara teoritis kenaikan pengeluaran pemerintah (G) sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan lewat instrumen kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Instrumen ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat (*purchase power*) sehingga dapat meningkatkan kehidupan perekonomian.

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah secara riil terus bergerak. Laju pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,75 persen, selanjutnya 18,10 persen dan 12,07 persen.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Salah satu komponen pengeluaran PDRB adalah Investasi. Dalam konteks PDRB, penggunaan, investasi dikenal sebagai Pembentukan

Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai “bruto” karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. PMTB adalah semua pengadaan barang modal untuk dipakai sebagai alat yang tetap (*fixed assets*). Selama ini pertumbuhan ekonomi secara umum ditopang oleh konsumsi (C dan G). Besarnya kontribusi konsumsi memberikan andil terbesar dari pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya motor pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal. Untuk itu kedepannya diharapkan investasi dan ekspor dapat memperbaiki kinerja daerah dan nasional.

Meskipun dalam perkembangan ilmu ekonomi ditemukan bahwa ada perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat penambahan stok modal dan angkatan kerja. Perbedaan ini merupakan faktor sisa atau residual sebagai hasil peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dari perubahan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Atas dasar itu, berkembang konsep modal manusia (*human capital*). Berdasarkan penelitian menunjukkan investasi tersebut telah menghasilkan sumber pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dengan investasi modal fisik tetapi informasi mengenai investasi yang ada dalam publikasi ini hanya terbatas pada investasi modal fisik.

Korelasi antara LPE dengan Investasi dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif karena adanya investasi. Dengan ICOR kita dapat melihat efisiensi penggunaan modal yang secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada tahun tertentu.

Sebagai contoh adalah Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga Ibukota Jakarta adalah propinsi yang paling diminati oleh investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri (manca

negara). Data dalam PDRB menunjang kondisi tersebut diatas, dimana besaran PMTB pada periode tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 senilai 30.581,650 milyar, kemudian naik cukup besar pada tahun 2024 hingga mencapai 47.749,373 milyar. Kenaikan komponen PMTB ini pada tahun 2021 sebesar 9,82 persen, bahkan pada tahun 2023 dan 2024 kenaikannya di atas 10 persen yaitu masing-masing sebesar 13,31 persen dan 16,82 persen. Jika dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi) laju komponen PMTB ini selalu mengalami percepatan laju yang relatif stabil, kecuali pada tahun 2022 yang sebesar 2,50 persen, laju pada periode 2021-2024 selalu di atas 3 persen dan laju yang paling tinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,15 persen. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan nilai investasi yang ditanamkan pada periode tahun 2021-2024 selalu mengalami peningkatan dengan penambahan besaran investasi yang stabil (meskipun terjadi inflasi) tiap tahunnya.

Di dalam keterlibatan terhadap perkembangan ekonomi, komponen PMTB pada periode tahun 2020-2024 mempunyai peranan yang stabil, yaitu di kisaran 15 persen. Kecuali di tahun 2022 dengan 14,94 persen, pada tahun lainnya mempunyai andil di atas 15 persen, andil terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan 15,64 persen. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa investasi mempunyai peranan yang cukup besar atau signifikan terhadap perkembangan perekonomian.

Investasi secara umum saat ini terbesar adalah dalam jenis bangunan, baru kemudian dalam jenis mesin, kendaraan dan perlengkapan lainnya. Diharapkan kedepannya investasi bukan hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Umar Juoro (ketua Dewan Direktur Cides) dalam makalahnya “kebijaksanaan investasi semestinya diarahkan pada kegiatan yang berorientasi ekspor, sehingga tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menambah devisa sehingga memperkuat nilai rupiah”.

Ekspor dan Impor (X & M)

Seperti yang telah digambarkan di atas, bahwa ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh dunia global juga tergantung pula pada pertumbuhan ekonomi global. Dalam dunia yang sudah semakin terbuka maka upaya meningkatkan kapasitas ekonomi suatu daerah atau wilayah atau negara dapat dilakukan dengan jalan mendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau wilayah atau negara. Semakin intensif dan besar volume perdagangan yang terjadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain maka akan semakin besar pula kapasitas ekonomi kedua belah pihak untuk berkembang. Suatu wilayah dikatakan memperoleh keuntungan atau manfaat atau surplus perdagangan jika terdapat spesialisasi atau spesifikasi produk atau jasa (komoditi unggulan).

Oleh karenanya, upaya mendorong ekspor sudah merupakan strategi tersendiri yang pada saat sekarang akan menentukan hidup matinya suatu negara. Usaha membangun daya saing nasional harus menjadi prioritas utama dalam mengembangkan perdagangan antar wilayah (daerah atau negara). Komoditi unggulan selama ini sebagai komoditi ekspor harus didukung dengan berbagai sarana yang harus diciptakan oleh kebijakan ekonomi secara makro dan strategi perusahaan secara mikro.

Ekspor pada periode tahun 2020-2024 berdasarkan harga yang berlaku, kecuali pada ekspor antar negara di tahun 2021, baik ekspor antar negara maupun antar propinsi hampir keseluruhan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 ekspor antar negara secara nominal sebesar 52.632,17 milyar turun dibandingkan tahun 2020 yang 54.860,16 milyar. Untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami kenaikan, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan mencapai 83.036,58 milyar, sedangkan ekspor antar propinsi yang terus mengalami kenaikan dari 28.063,17 milyar di tahun 2020 milyar hingga mencapai 42.584,87 milyar pada tahun 2024. Dibanding tahun 2023 peranan ekspornya yang mencapai 38,65 persen, maka pada

tahun 2024 andilnya meningkat menjadi 41,15 persen.

Neraca perdagangan di Propinsi pada periode tahun 2020-2024 ini mengalami surplus. Net ekspornya selalu positif, artinya ekspor lebih besar dari impor. Dan surplus yang terbesar dicapai pada tahun 2024 yaitu ditandainya dengan adanya besaran net ekspor yang mencapai 42.261,50 milyar.

Secara riil volume ekspor-impor pada tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan. Dimana ekspor lajunya meningkat 13,41 persen, sedangkan impor mencapai hingga 16,04 persen. Laju ekspor sangat dipengaruhi oleh peningkatan pada ekspor antar negara dengan laju 16,95 persen, dan laju impor sangat ditunjang dengan kenaikan pada impor antar propinsi yang mencapai 23,12 persen.

KESIMPULAN

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2020-2024 PDRB-nya menurut penggunaan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan hampir selalu mengalami peningkatan kecuali untuk ekspor dan impor yang pada beberapa tahun berkontraksi dengan pertumbuhan negatif yang cukup besar. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3.89 persen, selanjutnya tumbuh 3.94 persen, tahun 2023 tumbuh 4,53 persen dan tahun 2024 tumbuh cukup tinggi untuk periode setelah covid yaitu 5,08 persen.

Struktur perekonomian sedikit bergeser dengan terambilnya porsi konsumsi rumah tangga oleh komponen investasi dan ekspor. Diharapkan kedua komponen ini terus memacu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kontributor atau penentu terbesar perekonomian pada periode 2020 sampai dengan 2024 masih komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai proporsi diatas 60 persen, disusul PMTB yang berperan rata-rata 15 persen, Belanja pemerintah sekitar 6 persen serta ekspor netto sekitar 14 persen. Peranan pengeluaran lembaga nirlaba atau non-profit hampir

tidak menunjukkan sumbangan yang berarti karena hanya sekitar 0,6% dari PDRB total.

Tahun 2024 juga merupakan tahun dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang positif baik, begitu pula Indonesia mengalami hal yang sama. Hampir seluruh indikator seperti yang dipaparkan di atas menunjukkan kondisi yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred Hutaaruk, Sistem dan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalulintas Devisa Di Indonesia, Erlangga, Jakarta
- Amiruddin Ardani, Proses Perencanaan Ekonomi, PPS, PPR UGM, Yogyakarta
- Budiono, Mikro Ekonomi, BPFE UGM, Yogyakarta
- Buku diktat kuliah Pengantar Ekonomi Makro, Universitas Gunadarma, Jakarta
- Faisal Basri dan Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, Kencana, Jakarta
- Kadariah, Ekonomi Perencanaan, LP.FE, UI Jakarta
- Michael E.Porter, Competitive Strategy, the Free Press, Collier Macmillan Publishers, London
- Nopirin, Pengantar Ekonomi, BPFE, Yogyakarta
- N. Grgory Mankiw, Makroekonomi, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakar
- Paul Samuelson, Economics, Mc.Graw Hill Book Co., New York
- Richard G. Lipsey, dkk. Makro Ekonomi, Binarupa Aksara, Jakarta
- Richard G Lipsey dan Peter D. Steiner, Economics, Harper & Row, New York
- Rudiger Dornbusch dan Stanley Fischer, Ekonomi Makro, Rineka Cipta, Jakarta
- Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta
- Soelistyo dkk., Pengantar Ekonomi Makro, UT, Jakarta
- Suparmoko, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, BPFE, Yogyakarta